

STRATEGI PENGEMBANGAN KOMUNIKASI MASSA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN DENGAN PENDEKATAN JATI DIRI BANGSA YANG BERORIENTASI PADA BUDAYA

C. Tri. Wibowo, Sumardjo, D. Hafidhuddin dan S. S Agung

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Dramaga, Bogor, 16680, Indonesia

Abstract

The results of analysis about the nation's morality decline causes by lack of filtering the international culture morality, the nation's cultural damage, and lack of the educational mode for the community character. Condition of the nation's cultural damage causes by the influences of foreign culture (Westernization), lack of education and the understanding and practising of religion, and lack of preservation of the nation's noble cultural values. The effects of that causes are the national identity decline and lack of community participation in supporting agricultural development, and the end is less development of mass communications in supporting agricultural development with the nation's identity approach based on the culture orientation. The improvement of Indonesia nation's morality can be done by the establishment and enforcement of government policies are needed in order to filter the nation's culture, keeping the noble values of national culture, and increasing the character education/nation's character. Keeping the noble values of national culture can be done by promoting the valuable of nation's cultural values, practices the religious values into real action, and continuous the preserving national culture and monitoring of that activities. If the morality of Indonesia nations is improved then community participation increased and the national identity is more solid, the last society has an active participation in the development of mass communication with the nation's identity approach that oriented to the culture of Indonesia.

Key words: fixed the Indonesia nation's morality

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan penyelenggaraan Negara adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih untuk meningkatkan dan memantapkan jati diri bangsa. Jati diri bangsa Indonesia dibentuk oleh para pendiri negeri ini dalam empat konsensus dasar yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat sumber ini yang membentuk sikap kita dalam memandang diri kita sendiri, memandang bangsa lain dan memposisikan diri dihadapan Allah SWT (Boediono, 2009).

Di Era globalisasi sekarang ini, jati diri bangsa merupakan konsep yang hidup dan terbuka terhadap perubahan zaman. Bung Karno menyatakan nasionalisme kita hanya dapat hidup subur di taman sari Internasional, tidak dengan indoktrinasi, represi, kekerasan, tetapi dibangun dengan memperkuat rasa keadilan

rakyat, kebanggaan rakyat, serta meningkatkan rasa kesejahteraan rakyat yang merata.

Jati diri bangsa Indonesia dalam implementasinya sudah selayaknya didukung oleh empat pilar penyangga yang kokoh yaitu: kebudayaan nasional, politik nasional, ekonomi nasional, dan hukum nasional; sehingga pemerintahan yang bersih itulah kunci membangun jati diri bangsa, karena pemerintahan yang bersih akan memperkuat rasa keadilan, kebanggaan, dan kesejahteraan.

Pada konteks ekonomi, pembangunan jati diri bangsa tak lepas dari persoalan ekonomi rakyat, yang saat ini masih lemah. Meski telah 66 tahun merdeka, sekitar 150 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan (Indikator versi Bank Dunia, yakni Rp 20.000,-/hari). Bahkan Negara Indonesia sebagai Negara pengutang terbesar ke empat di seluruh

dunia (Wiranto, 2009). Kondisi sekarang ini, kekayaan mengalir ke luar negeri, karena itu untuk membangun jati diri bangsa, Indonesia harus menjadi bangsa yang mandiri berdikari bisa melalui program pembangunan ekonomi kerakyatan, mengarahkan segala sumber kekayaan untuk dimanfaatkan oleh rakyat kita. Kesenjangan dalam pendapatan masyarakat terjadi antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini berarti yang menikmati hasil-hasil pembangunan dan sumberdaya ekonomi hanya segelintir orang saja.

Kata kunci pembangunan jati diri bangsa dari sektor ekonomi adalah menyelamatkan sumberdaya ekonomi, kekayaan nasional agar tidak terus bocor serta mengubah strategi pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil dan lebih mengutamakan pemerataan. Berbagai kebijakan harus mampu mengubah dari Negara yang hanya menyuplai tenaga kerja murah dan sumber bahan baku (mentah) saja menjadi pengekspor tenaga kerja yang mempunyai *skill* dan penguasaan teknologi yang mempunyai kompetensi tinggi dan mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dengan tangan sendiri, mandiri dan berdikari. Bangsa Indonesia memiliki potensi sebagai bangsa yang mempunyai keunggulan komparatif jika dimanfaatkan secara optimum.

Di bidang ideologi saat ini telah terjadi degradasi ideologi yang luar biasa, Pancasila tidak lagi sering diucapkan, apalagi diamalkan. Padahal, yang mengantarkan bangsa Indonesia seperti sekarang ini adalah Pancasila yang merupakan dasar Negara sebagai salah satu dari empat elemen konsensus dasar pembangunan jati diri bangsa Indonesia.

Di bidang politik tidak membangun kesejahteraan dan kebersamaan, tetapi lebih sering terjadi perpecahan di antara komponen bangsa. Sering juga muncul politik praktis yang

bicara pada tataran sekuler dan tak bermoral, tidak beretika, saling menyerang, dan menghalalkan segala cara.

Jati diri suatu bangsa akan lebih bermartabat jika dilandasi oleh keyakinan beragama dan saling menghargai sesama penganutnya. Sudah seharusnya agama digunakan sebagai pedoman dalam setiap individu dan kelompok dalam bermasyarakat dan bernegara. Agama secara substansial harus selalu dijadikan sumber nilai akhlak dan moral, sehingga semua aspek-aspek berbagai program harus selalu ditarik kepada etika norma agama. Seperti: etika berpolitik, etika berdagang di perekonomian, etika berbudaya yang bermoral, etika bersosial masyarakat dan bernegara. Artinya, apabila berpolitik, berpolitiklah yang santun tidak saling menyerang, berpolitik dengan moral etika agama, bersosialisasi kemasyarakatan yang harmonis, etika perekonomian dengan syar'i atau dasar syariah agama termasuk di dalamnya nilai moral dan spiritual pada etika pengembangan sosial budaya.

Pada prinsipnya agama memang sesuatu yang sakral tetapi substansi agama harus mampu diserap dalam praktek berbagai aspek-aspek tersebut, dengan harapan tidak menghalalkan segala cara dalam menuju cita-cita luhur pembangunan nasional yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Peran Negara bertanggung jawab pada kebebasan beragama, hanya saja tidak boleh merugikan kelompok lain karenanya agama diletakkan ditempat yang mulia meskipun nilai – nilainya mendasari dalam berbagai aspek dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara, Negara sebagai fasilitator, pengayom dan pelindung rakyat

Agar agama tidak dipandang sebagai sesuatu yang normatif saja, maka semua individu dan komponen

bangsa harus selaras antara pikir, kata dan tindakan, sehingga Negara akan aman, damai, dan sejahtera. Sebaliknya dengan memasukkan agama dalam setiap aspek berbangsa dan bernegara bukan berarti menuju pada Negara agama. NKRI tetap sebagai Negara yang berwawasan nasional (Nusantara). Artinya, suatu kebersamaan dalam keaneka ragaman agama, budaya, suku, etnis, sehingga dari kebinnekaan itulah anugerah sebagai suatu potensi yang harus dikembangkan dan dijaga utuh.

Upaya pengentasan kemiskinan sejak zaman pemerintahan orde baru sudah dirasakan manfaatnya, terbukti dari penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi antara tahun 1976 hingga tahun 1996. Pada tahun 1976 proporsi penduduk miskin sekitar 40,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 1996 proporsi penduduk miskin tinggal 17,7 persen dari 185 juta penduduk Indonesia (BPS, 2002). Pada masa itu berbagai upaya dan kebijakan dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Sejak terjadinya multi krisis ekonomi dan sosial yang melanda bangsa Indonesia sejak 1997 hingga sekarang ini, terjadi peningkatan penduduk miskin secara fluktuatif. Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin hanya tinggal 17,7 persen dari penduduk Indonesia. Pada tahun 1998 meningkat menjadi 24,2 persen (BPS, 2002). Pada masa itu dampak krisis ekonomi sangat dirasakan terhadap kehidupan masyarakat, lapangan kerja sangat terbatas, pendapatan menurun, perekonomian nasional menjadi stagnan.

Pada tahun 2000 terjadi perbaikan jumlah penduduk miskin hanya 19,1 persen (13,7 juta jiwa) dari jumlah penduduk Indonesia dan kemudian menurun kembali menjadi 18,2 persen (15,6 juta jiwa) pada tahun 2002 (BPS, 2004). Pada tahun 2005 jumlah

penduduk miskin berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BPS tahun 2005 yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) Rumah Tangga Miskin meningkat sebesar 15,5 juta Rumah Tangga Miskin (Depsos, 2005).

Keberadaan Rumah Tangga Miskin tersebut tidak bisa dipungkiri lagi bahwa mereka adalah bagian dari penduduk Indonesia yang mayoritas berada di pedesaan. Belum lagi permasalahan yang akan muncul sekarang dan kemudian hari yaitu terkena dampak langsung dari krisis multi dimensi serta globalisasi.

Pembangunan pertanian nasional menghadapi tantangan besar untuk mampu bersaing secara global. Hal ini disebabkan mayoritas usahatani dikelola oleh petani berlahan sempit, bermodal kecil, dengan pendidikan yang relatif rendah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya untuk memberdayakan petani dalam memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Selain sistem penyuluhan yang efektif, penyediaan akses informasi, penerapan teknologi pertanian, upaya lain adalah pengembangan strategi komunikasi massa dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia dengan pendekatan jati diri bangsa yang berorientasi pada budaya, hal ini lebih difokuskan kepada masyarakat di pedesaan, yang pada umumnya petani. Dengan harapan moral bangsa Indonesia semakin membaik dengan pendidikan watak dan budi pekerti yang berkelanjutan serta melestarikan berbagai budaya bangsa yang adi luhung.

Komunikasi massa seperti apa yang diperlukan untuk menyukseskan pertanian di Indonesia, berpijak dari kondisi yang diperlukan di masyarakat pedesaan dewasa ini maka komunikasi massa yang dimaksud adalah komunikasi yang berlandaskan pada budaya yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Pengembangan strategi komunikasi massa tidak terlepas dari berbagai elemen yang mempengaruhinya, seperti: partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan pertanian. Meningkatnya partisipasi, akan lebih memantapkan jati diri bangsa, yang sasaran akhirnya adalah membaiknya moral bangsa Indonesia. Sebagai kata kuncinya adalah memperbaiki moral Bangsa Indonesia.

Penelitian ini berusaha mengkaji dan menganalisis strategi komunikasi massa dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia dengan pendekatan jati diri bangsa yang berorientasi pada budaya.

Penelitian ini berusaha mengkaji dan menganalisis strategi komunikasi massa dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia dengan pendekatan jati diri bangsa yang berorientasi pada budaya

1.2 Tujuan penelitian

1. Menganalisis kedinamisan dan keberhasilan Pengembangan strategi komunikasi massa dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia dengan pendekatan jati diri bangsa yang berorientasi pada budaya.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kedinamisan dan keberhasilan tersebut di atas.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor utama penentuan keberhasilan tersebut di atas.
4. Merumuskan model pengembangan strategi komunikasi massa yang lebih efektif melalui pendekatan jati diri bangsa yang berorientasi pada budaya bangsa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi dan informasi

Menurut Khun dalam Bertrand (1980) dan Sumardjo (1999) tujuan mengadakan komunikasi dapat

dikategorikan dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Untuk penyebaran (*dissemination*) informasi dan

2. Untuk menumbuhkan informasi

Adapun tujuan Informasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengubah konsep-konsep yang ada pada pihak si penerima informasi (apa yang ia ketahui selama ini).
2. Fungsi motivasi dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan, pada kecenderungan atau perasaan si penerima informasi.
3. Pada gilirannya motivasi tersebut mendorong timbulnya perilaku yang diarahkan oleh pengetahuan yang terbentuk dari informasi tersebut.

Komunikasi pembangunan dapat dicerminkan oleh suatu komunikasi yang berorientasi pada:

1. Perilaku / edukasi
2. Kesejahteraan
3. Menuju ke arah kemajuan masyarakat.

2.2 Strategi pembangunan

William Overvolt dalam Asep Setiawan (2006) memberikan sejumlah daftar tentang strategi umumnya yang dicapai negara industri baru khususnya di Asia dan Pasifik. Berikut ini faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Asia.

1. Merangsang kebangsaan, jika diperlukan mempertentangkannya dengan kekuatan negara maju. *Nation building* atau pembangunan bangsa merupakan salah satu tugas berat yang dilaksanakan negara-negara baru di Asia. Mereka harus membangkitkan perasaan kebangsaan untuk mendorong terjadinya persatuan. Dengan perasaan senasib sepenanggungan, maka anggota masyarakat makin solid. Apabila pihak berkuasa menciptakan "musuh" dari luar maka dengan mudah masyarakat akan bersatu

- demi pembangunan ekonomi dalam melawan musuh itu.
2. Membersihkan lembaga-lembaga pemerintah: membasmi mereka yang menyia-nyiakan waktu dan tidak kompeten. Selain itu negara-negara industri baru itu juga menempatkan teknokrat yang bersekolah di Barat.
 3. Menumpas kejahatan, pemogokan politik dan kekacauan. Pemerintah di negara-negara industri baru melancarkan kebijakan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Salah satu unsurnya adalah menstabilkan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Kejahatan ditumpas agar menjamin keamanan pelaku ekonomi. Demikian aksi-aksi pemogokan yang dipolitisir dan berpotensi menimbulkan kekalutan diredam. Tekanan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku demonstrasi memang sangat keras namun akibatnya muncul stabilitas meskipun bersifat semu.
 4. Menindas kelompok penekan yang menyebabkan patronisme, korupsi dan inflasi. Berbagai kelompok dalam masyarakat yang berperan sebagai kelompok penekan sering menimbulkan masalah baru. Mereka kadang-kadang menumbuhkan pola patron-klien yang kemudian membuka peluang lahirnya praktek-praktek korupsi.
 5. Menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan negara-negara industri maju dalam rangka mencari modal, pasar dan teknologi. Negara industri baru dalam memacu ekspor dan memasuki pasar asing mereka meniru standar yang diberlakukan oleh negara maju. Mereka pun mendesain industrinya yang sesuai dengan apa yang dicapai negara maju.
 6. Menata agar anggaran militer rendah, sedangkan anggaran pembangunan tinggi. Pada masa pertumbuhan ekonomi tinggi selama tiga dekade terakhir, banyak negara industri baru tidak membesarkan anggaran militer karena dianggap menyedot anggaran. Pada masa pertumbuhan itu, militer berperan untuk menjaga tidak terjadi ancaman dari luar. Namun demikian terlihat bahwa begitu pendapatan itu naik maka ada keinginan dari militer untuk memperbarui persenjataannya.
 7. Mengalihkan diri pada pertumbuhan yang disebabkan ekspor. Semua negara industri baru bisa tumbuh cepat karena memacu ekspor. Jenis ekspor masih berupa barang setengah jadi atau barang manufaktur yang masih sederhana sifatnya seperti sepatu atau televisi. Indonesia dan Malaysia memacu ekspor hasil alam.
 8. Reformasi pemerataan pendapatan. Jalan yang ditempuh antara lain dengan: (a) reformasi pembagian tanah (land reform); (b) industri padat karya (buruh murah, tekstil, pertanian dan barang elektronik); dan (c) investasi besar-besaran di bidang pendidikan.
 9. Menghadapi kelompok kiri dengan reformasi merakyat. Langkah yang benar dalam pertumbuhan: berikan massa rakyat keterlibatan dalam masyarakat. Sebagian dari negara-negara industri baru menghadapi persoalan pemberontakan komunis yang diakibatkan oleh pertarungan negara adidaya pada waktu Perang Dingin. Pemerintah negara-negara di Asia menawarkan pembangunan ekonomi untuk memangkas dan memberantas pertumbuhan ajaran komunis yang dimotori Cina dan sekutunya. Setelah Uni Soviet bubar tahun 1991, maka ajaran komunis mulai melunak. Bahkan Cina telah menyelesaikan diri dengan ajaran kapitalisme yang selama ini ditentangnya. Pembangunan

ekonomi Cina mengandalkan bantuan Barat untuk teknologi dan investasinya.

10. Menciptakan perusahaan yang besar dan modern untuk menjamin tercapainya target perdagangan. Di beberapa negara seperti di Korea Selatan, perusahaan besar keluarga diciptakan untuk memacu industrialisasi. Perusahaan konglomerat ini yang di Korsel disebut Chaebol menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan.
11. Dapatkan teknologi, modal dan perdagangan dari perusahaan multinasional dan bank internasional. Menggunakan teknokrat dan para pemimpin nasionalis untuk memaksimalkan keuntungan bagi negara.
12. Meniti tangga yang dimulai dengan sektor padat karya seperti pertanian dan bahan mentah, industri tekstil dan sepatu, industri ringan seperti pabrik televisi dan industri teknologi tinggi.
13. Penggunaan alat-alat otoritarian, jika diperlukan, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kadang-kadang karena ingin memelihara stabilitas, pemerintah bersikap kaku dan keras sehingga timbul kesan adanya otoritarian dalam pemerintah. Sikap pemerintah yang otoritarian itu untuk tingkat tertentu berhasil keberhasilan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, dalam situasi dimana proses demokratisasi makin luas, sikap otoriter pemerintah makin keinggalan.

Faktor-faktor itu memang bisa diperdebatkan. Apakah memang unsur itu yang menyebabkan keberhasilan pembangunan ekonomi Asia Pasifik. Namun demikian ada konsensus yang luas mengenai unsur utama kisah sukses Asia Timur dan Asia Tenggara. Pertama, orientasi internasional ekonomi

Jepang dan NICs membuat mereka mampu mengeksploitasi peluang yang menguntungkan dari lingkungan ekonomi dunia dan menerobos keterbatasan dalam pasar domestik. Ekspor dipacu melalui kebijakan pajak dan kredit yang menguntungkan. Monitoring ekspor juga dilakukan untuk mencari peluang baru. Nilai tukar mata uang juga disesuaikan secara realistis.

Kedua, negara-negara ekonomi Asia memiliki memulai dengan cukup baik dalam modernisasi ekonomi selama periode sebelum perang. Ini terlihat dari kasus Jepang dimana tahun 1930-an memiliki basis industri yang cukup untuk menghadapi perang besar.

Ketiga, konsensus politik dalam pembangunan ekonomi yang membenarkan perlunya pemerintahan yang kuat (*strong government*) dalam menentukan dan memandu pertumbuhan ekonomi. Gagasan pemerintahan yang kuat kadang-kadang diterjemahkan sebagai pemerintahan yang semi demokratik atau semi otoriter. Adanya pemerintah yang kuat ini menyebabkan dominasi pemerintah besar dalam menentukan target pembangunan tanpa harus mempertimbangkan kritik-kritik yang bermunculan dari berbagai kalangan.

Keempat, tingkat stabilitas politik yang tinggi. Semua negara baru Asia Timur dan Asia Tenggara yang tumbuh dengan cepat diperintah oleh kekuatan politik poros tengah dan konservatif yang cenderung mau berdekatan dengan Barat.

Kelima, faktor budaya. Jepang dan negara industri baru dikatakan memiliki nilai-nilai Kong Hu Cu yang sama yang menekankan pada unsur kerja keras, menabung, disiplin, sekuler, kewirausahaan dan meningkatkan pendidikan. Nilai-nilai seperti itu memang tidak secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi namun dianggap sebagai faktor kondusif

dalam formulasi kebijakan di tingkat publik dan perilaku sederhana di sektor swasta yang mendorong pertumbuhan ekonominya.

Meski Asia telah dilanda krisis dan sebagian masih diterpa krisis namun jika faktor-faktor pendukung terhadap pertumbuhan ekonomi tetap eksis maka masih ada peluang untuk bangkit kembali. Krisis ekonomi dan moneter telah membuka dan membongkar kelemahan pertumbuhan ekonomi tinggi dalam tiga dekade ini. Krisis bisa dianggap sebagai peluang untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam pembangunan ekonomi. Namun

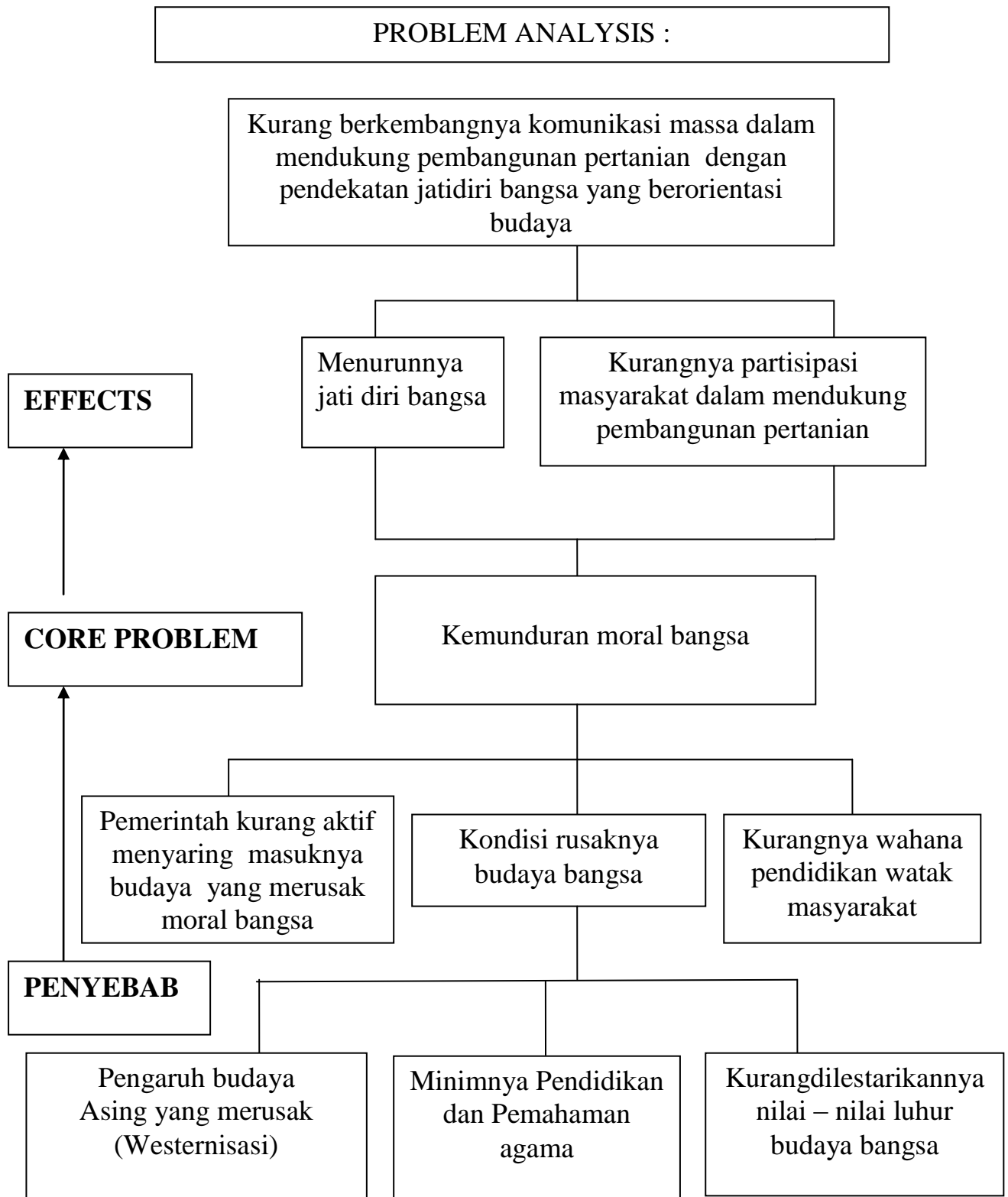
demikian juga berpotensi sulit sembuh karena kompleksnya masalah ekonomi.

III. ALUR PIKIR DAN

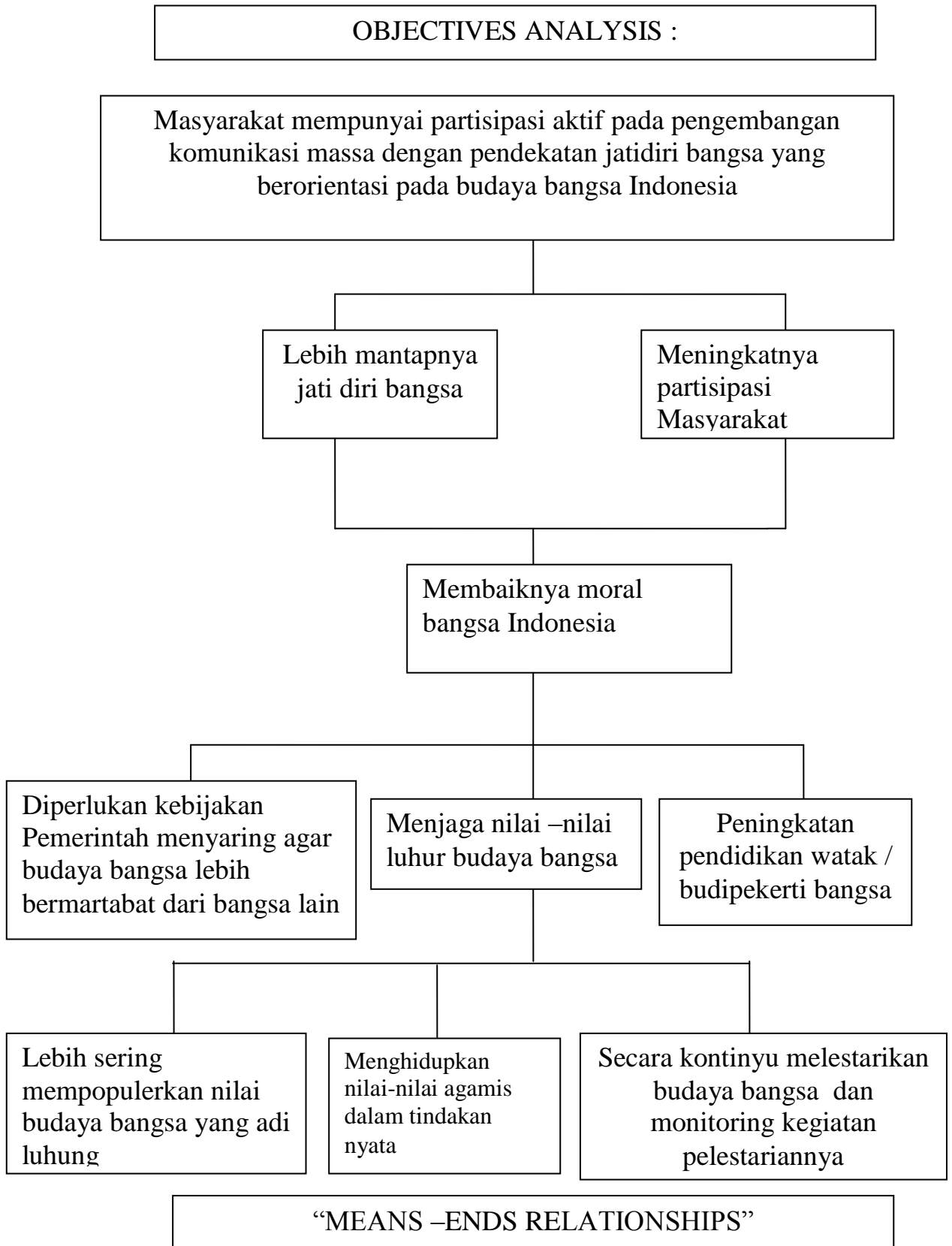
METODOLOGI

Metode penelitian berupa analisis data sekunder dari referensi yang relevan dengan upaya menjawab tujuan penelitian.

Berikut bagan alur rumusan masalah yang menjadi dasar pertimbangan pentingnya penelitian ini dilaksanakan (Gambar 1), dan Gambar 2 mengenai paradigma analisis tujuan.



Gambar1. Masalah utama mundurnya moral bangsa, penyebab dan akibatnya



Gambar 2. Konsep memperbaiki moral bangsa melalui pendekatan budaya dengan pengenalan jati diri

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebudayaan Indonesia

Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, Kebudayaan Indonesia dapat didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan yang telah ada sebelum bentuknya nasional Indonesia pada tahun 1945. Seluruh kebudayaan yang berasal dari kebudayaan beraneka ragam suku-suku di Indonesia merupakan bagian integral daripada kebudayaan Indonesia.

Kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam, namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India dan kebudayaan Arab. Kebudayaan India terutama masuk dari penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara jauh sebelum Indonesia terbentuk. Kerajaan-kerajaan yang bernafaskan agama Hindu dan Budha sempat mendominasi Nusantara pada abad ke-5 Masehi ditandai dengan berdirinya kerajaan tertua di Nusantara, Kutai, sampai pada penghujung abad ke-15 Masehi.

Kebudayaan Tionghoa masuk dan mempengaruhi kebudayaan Indonesia karena interaksi perdagangan yang intensif antara pedagang-pedagang Tionghoa dan Nusantara (Sriwijaya). Selain itu, banyak pula yang masuk bersama perantau-perantau Tionghoa yang datang dari daerah selatan Tiongkok dan menetap di Nusantara. Mereka menetap dan menikahi penduduk menghasilkan perpaduan kebudayaan Tionghoa dan yang unik. Kebudayaan seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu akar daripada kebudayaan modern di Indonesia semisal kebudayaan Jawa dan Betawi. Kebudayaan Arab masuk bersama dengan penyebaran agama Islam oleh pedagang-pedagang Arab yang singgah di Nusantara dalam perjalanan mereka menuju Tiongkok.

Memperhatikan sejarah sekelompok suku yang hidup di sebuah kawasan disebut Nusantara ini, Umar Kayam mengibaratkan orang Indonesia sebagai manusia dengan tulang 48egativ, berbalut

daging Hindu, berjubah Arab, dan berparfum Eropa. Harus segera dikatakan bahwa kawasan ini telah lama merupakan kawasan “sampah-sampah peradaban dunia”. Artinya, baik Hindu, Islam dan Kristen yang dibawa oleh para misionarisnya, bukanlah Hindu, Islam, dan Kristen “asli” seperti dikenal di tanah kelahiran ketiga agama besar dunia ini. Seperti juga dalam setiap proses transmisi dan komunikasi gagasan, gagasan-gagasan awal mengalami berbagai proses “pengurangan dan penambahan” baik disengaja ataupun tidak melalui adaptasi, penerjemahan, dan penafsiran.

Dalam perspektif ini, mengatakan “NKRI adalah final,” dan merumuskan sebuah “jati diri bangsa” ini bukanlah hak sebuah generasi atau kelompok tertentu bangsa ini. Bahkan dalam era globalisasi ini, pertanyaan soal jati diri bangsa ini bisa dianggap tidak relevan. Jika jatidirinya merupakan gambaran tentang “postur budaya aslinya,” orang Indonesia “asli,” jika misalnya Homo Soloensis dan Homo Mojokertoensis bisa disebut demikian, prestasinya tidak tercatat membanggakan. Jati diri sebuah bangsa adalah sebuah “proses menjadi” terus menerus yang dibayangkan bersama secara sadar oleh anggota bangsa tersebut. Artinya, jati diri bangsa, dan “bentuk 48egati RI” adalah sebuah “proyek 48egative48 bersama,” sebuah “proses penemuan,” sebuah proses “memaknai kebersamaan sekelompok suku dalam suatu kawasan” dalam rangka memenangkan kompetisi budaya dunia. Ini berarti bahwa jati diri bangsa merupakan sebuah proses kreatif bangsa tersebut untuk mempertahankan diri sebagai sebuah bangsa dalam sebuah pertarungan dan penaklukan budaya di dunia.

Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa tersebut untuk melakukan evaluasi diri secara terus menerus, keberanian meninggalkan aspek-aspek 48egative budaya sendiri, dan mengambil aspek-aspek positif budaya *main stream*, serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh

tanggungjawab. Masyarakat atau bangsa Eropa adalah contoh mutakhir yang dapat kita lihat (sebagai catatan, luas Indonesia membentang sejak London hingga Ankara). Kegagalan menyepakati sebuah Konstitusi Eropa dalam empat tahun terakhir ini membawa “bangsa Eropa” mempertanyakan kembali jati dirinya.

Proses globalisasi –bersama gagasan-gagasannya- yang tidak seimbang saat ini telah menyebabkan bangsa-bangsa dunia ketiga dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Karena globalisasi adalah sebuah proses penaklukan budaya, upaya mempertahankan jati diri ini adalah mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang takluk secara budaya, disukai atau tidak, akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif.

Dalam kaitan inilah, pendidikan watak dan budi pekerti merupakan sebuah upaya sadar untuk membangun kapasitas kreatif bangsa ini. Kreativitas sebuah bangsa barangkali merupakan satu-satunya aspek yang terpenting dari bangsa tersebut karena, pertama, bangsa adalah sebuah komunitas yang diimajinasikan (*an imagined society*). Perlu segera dikatakan, bahwa jati diri bangsa hanyalah atribut (sifat) yang dilekatkan secara konsensual oleh bangsa tersebut. Kedua, makna pendidikan watak dan budi pekerti di Indonesia sekarang hanyalah upaya mengantar peserta didik ke masa depan yang penuh gejolak, ketidakpastian, dan ketidakjelasan. Hanya bangsa kreatif yang akan mampu bertahan, dalam arti menemukan jati dirinya, dalam lingkungan tidak pasti, dan tidak jelas tersebut.

4.2 Kreativitas sebagai tanggung jawab sejarah

Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utamanya sebagai makhluk sejarah. Sejarah (*history*) adalah kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup.

Pertanggungjawaban yang kita tagih pada setiap manusia mensyaratkan bahwa manusia kita beri kewenangan kreatif. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk bertanggungjawab. Kewenangan kreatif ini diwujudkan pada kapasitas kreatifnya, yaitu : 1) Kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk “pasar” yang dilayaninya, 2) Kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif, 3) Kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus menerus, 4) Kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah, 5) Kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut, 6) Keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggungjawab, 7) Keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk.

Segera perlu dicermati, bahwa di samping kapasitas kreatif adalah pondasi kepemimpinan (*leadership*), kapasitas kreatif manusia lebih banyak ditentukan oleh kecerdasan emosional, moral, spiritualnya. Memimpin pada dasarnya adalah memilih pilihan-pilihan moral, dan memilih jati (citra) diri. Dalam hal ini, kompetensi berbahasa dan berkomunikasi (terutama mengarang, bercakap-cakap, mendengarkan dengan penuh perhatian) merupakan kompetensi yang instrumental. Kecerdasan akal (IQ) yang bersifat analitik, vertikal-sikuensial, dan *crispy*, hanya menyusun kurang dari 20 persen kapasitas kreatif manusia. Pemujaaan berlebihan pada kompetensi kognitif, sains, dan matematika selama ini, telah memberi gambaran yang keliru mengenai kompetensi yang perlu ditumbuh-kembangkan bagi warga negara. Ditambah dengan proses pembelajaran yang tidak berpusat pada siswa, kapasitas kreatif siswa menjadi tidak berkembang secara optimal, bahkan – dalam banyak kasus- justru dimatikan.

Ciri terpenting masa depan adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan. Jika

pendidikan adalah pengantar ke masa depan, maka sekolah seharusnya merupakan sebuah *training ground* penyikapkan secara sehat ketidakpastian dan ketidakjelasan tersebut. Pembelajaran kontekstual, memberi tantangan intelektual, emosional, moral cukup, merupakan lingkungan kondusif bagi penumbuhan kapasitas kreatif (dan dengan demikian juga kepemimpinan) siswa. Ketidaktuntasan penyelesaian bertumpuk masalah kita dalam periode reformasi (demokratisasi dan desentralisasi) saat ini sebagian besar disebabkan sikap tidak kreatif para pemimpin formal birokrasi yang lamban dan *indecisive*. Ciri pemimpin (daerah, dan pada berbagai tingkatan hirarki) tidak bertanggungjawab semacam ini adalah dengan mengatakan “saya hanya pelaksana, bertindak berdasarkan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan dari atasan saya,” seolah-olah mereka hanyalah sebuah tombol yang ditekan secara “*remote control*” dari Jakarta. Oleh karena itu, guru sebagai pemandu siswa ke masa depan, perlu memiliki kompetensi *in-promptu* untuk mengembangkan pengalaman belajar bermakna secara inovatif dan luwes. Guru yang menggantungkan diri pada “juklak dan juknis rinci” dari “atas” sehingga tidak perlu melakukan interpretasi – dan oleh karenanya tidak bertanggungjawab- (apalagi kelulusan siswanya ditentukan oleh Ujian Nasional) bukanlah guru kompeten untuk mengembangkan kapasitas kreatif anak didik.

Kapasitas kreatif juga ditunjukkan oleh kemampuan berpikir secara sintetik, lateral-paralel, dan *fuzzy*. Kapasitas kreatif yang rendah bangsa Indonesia sebagian ditunjukkan oleh statusnya sebagai konsumen sains dan teknologi. Perlu dicermati juga, bahwa kapasitas kreatif ini merupakan penyusun modal buatan bangsa ini. Ketergantungan pada modal alamiah merupakan bukti langsung betapa kapasitas kreatif bangsa ini tidak berkembang, sehingga kemakmurannya diperoleh dengan cara melakukan

eksploitasi kekayaan alamnya, bukan melalui proses nilai tambah yang berbasis pengetahuan, teknologi, dan seni. Seluruh ekspor tambang, kayu, hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, habis oleh impor produk-produk teknologi dan budaya bangsa dunia pertama (telekomunikasi, mobil, pesawat terbang, film, musik, fashion, perangkat lunak). Pada saat lingkungan kita semakin rusak, dan kita semakin miskin, negara-negara kreatif semakin kaya, lingkungan mereka semakin terpelihara, dan menjajah kita secara budaya.

4.3 Implikasi Pendidikan Watak dan Budi Perkerti

Mengembangkan kapasitas kreatif dalam rangka membangun jati diri bangsa harus dipijakkan pada upaya menjadikan peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran, dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengalami proses pembelajaran tuntas. Desain kurikulum saat ini kurang tepat, karena dengan beban seberat saat ini, baik peserta didik maupun guru/dosen hanya tertarik dengan aspek-aspek kognitif – analitik peserta didik, sehingga tidak terjadi pembelajaran tuntas. Dengan koleksi perpustakaan dan terbatasnya akses internet, peserta didik dan guru tidak terdorong untuk melakukan proses-proses pembelajaran yang lebih bersifat penguasaan proses *inquiry*, tapi lebih tertarik pada hasil proses yang telah disediakan. Proses individualisasi pengetahuan tidak terjadi, sehingga peserta didik akan segera “melupakan” materi begitu semester berganti. Sistem evaluasi hampir selalu evaluasi tertulis, bahkan pilihan berganda, yang analitik dan reduksionistik. Pengembangan kemampuan-kemampuan sintetik, dan lintas-disiplin, bekerja dalam kelompok tidak berkembang, karena ini “mempersulit” peserta didik dan guru sendiri. Harus juga dikatakan, bahwa guru dan dosen tidak terbiasa untuk memberikan tantangan intelektual yang cukup, materi kuliah dan ujian yang tidak banyak

perubahan dan pemutakhiran, sehingga berkembang budaya “baceman” di kalangan mahasiswa.

Mahasiswa juga tidak terbiasa menjadi manajer kuliahnya sendiri. Pada umumnya, mahasiswa tidak tahu apa tujuan kuliahnya, dan oleh karena itu tidak memiliki strategi menyelesaikan kuliahnya. Sangat penting untuk mempersoalkan tujuan kuliah mahasiswa *up-front* pada masa-masa awal kehidupan kampusnya (*to challenge them about their objectives up-front*), agar mahasiswa mulai menyadari tujuan, kendala, dan kebutuhan untuk merumuskan strategi atau “rencana” kuliahnya. Ini dimaksudkan agar mahasiswa didorong untuk bertanggungjawab atas kesuksesan kuliah mereka sendiri, serta memberi pengalaman bermakna pada kehadiran mereka di kampus. Di samping mahasiswa harus mengisi Formulir Rencana Studi (akademik), mereka perlu juga mengisi Formulir Rencana Pengembangan Kepribadian. Pengembangan kepribadian (watak) tidak boleh lagi dianggap sebagai pelengkap (*supplementary*), namun betul-betul merupakan bagian integral pendidikan (*complementary*).

Upaya meneguhkan jati diri bangsa dapat dilakukan dengan membangun pendidikan watak dan budi pekerti yang mengembangkan kapasitas kreatif dan kepemimpinan peserta didik sebagai warga negara. Pendidikan yang membangun kapasitas kreatif ini akan menentukan kemampuan bangsa ini menemukan jati dirinya sendiri sebagai bagian dari proses konsensus bangsa ini sebagai sebuah komunitas yang diimajinasikan. Bangsa yang memiliki jati diri adalah bangsa yang warga negaranya memiliki jati diri.

Upaya membangun kapasitas kreatif ini seharusnya sudah dimulai sejak pendidikan dasar. Pendidikan sebagai pengantar anak didik ke masa depan perlu didorong agar menjadi gerakan budaya yang mengembangkan *local leaders* yang sanggup menghadapi ketidakpastian dan ketidakjelasan secara kreatif.

Memaksakan sebuah tafsir “jati diri” tertentu bagi mereka, atau menganggap bahwa NKRI adalah bentuk final –yang akan cocok sepanjang masa- merupakan penghinaan atas tanggung jawab kreatif mereka dan pegingkarannya atas tanggungjawab sejarah mereka sebagai pemimpin di masa depan.

Sekolah dan kampus perlu mendisain ulang kurikulumnya menjadi tidak “padat akademik” seperti sekarang dengan jumlah sajian akademik yang terlalu banyak (lebih dari 6). Beban yang lebih “peka kepribadian” adalah 12 sks dengan jumlah sajian akademik 3 atau 4 saja, sehingga pendalaman materi dan pengembangan kepribadian peserta didik memperoleh porsi perhatian, dan alokasi sumberdaya yang lebih memadai. Model evaluasi hendaknya lebih multi-ranah, kualitatif, dan mendorong proses pembelajaran tuntas. Tugas-tugas lintas –disiplin yang bersifat sintetik juga perlu dikembangkan.

Peserta didik berkapasitas kreatif memadai akan mampu membangun jati dirinya sendiri, dan sebagai warga negara akan sanggup secara aktif melakukan transaksi-transaksi sosial yang diperlukan untuk membangun bangsanya sendiri. Jati diri bangsa selanjutnya akan ditemukan dalam proses konsensus kreatif ini. Adalah tanggungjawab sejarah mereka, dan terserah mereka untuk menentukan jati diri, atau bentuk negara RI ini. Ini yang membuat masa depan mereka tidak sekedar “warisan,” namun menjadi menantang dan mungkin menegangkan, dan oleh karena itu menjadi berharga dan pantas diperjuangkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam memperbaiki moral bangsa diperoleh beberapa alternatif penyelesaian antara lain :

1. Dari menganalisis kedinamisan penemuan teknologi baru yang kebanyakan dari barat berdampak pula masuknya budaya asing yang menyertainya untuk itu diperlukan kebijakan Pemerintah menyaring agar budaya bangsa lebih bermartabat dari bangsa lain
2. Setidaknya ditemukan faktor -faktor yang mempengaruhi kedinamisan dan keberhasilan memperbaiki moral bangsa yaitu dengan meningkatkan pendidikan watak mengajarkan budi pekerti bangsa dari usia dini tingkat TK, SD SMP sampai SMA dan Perguruan Tinggi
3. Yang terakhir Menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai faktor utama penentu keberhasilan melalui :
 - a. Lebih sering mempopulerkan nilai budaya bangsa yang adi luhung,
 - b. Menghidupkan nilai-nilai agamis dalam tindakan nyata
 - c. Secara kontinyu melestarikan budaya bangsa dan monitoring kegiatan pelestariannya.

5.2 Saran

Diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak : para akademisi dari hasil penelitiannya diharapkan masukan – masukan yang konstruktif, para birokrat pengambil keputusan di tingkat pusat maupun daerah dimana kebijakan disesuaikan dengan budaya setempat, para orang tua, guru sebagai pendidik langsung generasi masa depan bangsa membekali dengan etika, sopan santun, budi pekerti sehingga sikap dan perilaku generasi bangsa terarah berdasarkan budaya yang adi luhung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Hazim, 1997. Nilai-nilai Etis dalam Wayang. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Asep Setiawan (2006), Strategi pembangunan Negara-negara Industri Baru di Asia <http://globalisasi.wordpress.com/2006/07/10/>
- [BKPK] Badan koordinasi penanggulangan kemiskinan, 2001. Penelitian Semeru. BKPK. Bandung.
- [BPS] Badan Pusat Statistik, 2005. Penetapan rumah tangga miskin dalam rangka pemberian bantuan langsung tunai. BPS. Jakarta.
- Daniel M Rosyid, 2007. Membangun jati diri bangsa sebuah tantangan kreatif. <http://www.dmrasyidwordpress.com/> (diakses 16 juni 2007).
- Kincaid, D.L. 1979. *The Convergence Model of Communication*. Paper of The East-West Communication Institute. Hawaii, Honolulu.
- King, WR dan DI Cleland, 1991, *Strategic Planning and Policy*. Van Nastrand Reinhold.
- Melkote, SR. 2002. *Communication for Development in the Third World: Theory and Practice*. Sage. New Delhi
- Mark Borthwick, 1992. *Century: The Emergence of Modern Pacific Asia*. Boulder, Westview Press. USA.
- Sumardjo, 1999. Materi kuliah S3, Komunikasi Perubahan Sosial. Departemen SKPM, Fakultas Fema Institut Pertanian Bogor.